

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA PEKANBARU NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG IZIN BANGUNAN DALAM DAERAH KOTA PEKANBARU (Studi
Kasus Kecamatan Tampan)**

Rio Ryan Rahmawan
Pembimbing Dra. Ernawati, M.Si
awasflubabi@yahoo.com
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

ABSTRACT

Much difference between who has a license with an unlicensed that from 2010 to 2012 data do not take care of as much as 1277 building permit and take care of IMB data from 2010 to 2012 amounted to 895. Thus, the data permit an unlicensed more than to have a permit. Phenomena that are found in this study that most people are not clearly know the procedures on how to apply for a building permit, low public awareness about the importance of BMI in the arrangement of buildings in setting up the building, supervision of spatial planning and building department itself until now this is still lacking.

The concept of the theory that the researchers use a policy theory, Theory of Policy Implementation. This study uses qualitative research methods to study descriptive data. In collecting the data, the researcher used interview, observation and documentation. By using key informants as a source of information.

The results showed that on the Implementation of Pekanbaru City Regulation No. 14 of 2000 on Building Permits in Pekanbaru City Region (Case Study District of Handsome) based on indicators, it can be concluded that surveillance conducted by the Department of Spatial Planning and Building Pekanbaru has not gone well because they scarcity of authorized personnel to evaluate and follow up errors and shortcomings of existing officers, lack of public awareness of the regulations that have been made by the government so that government regulation is less terimplemntasi well.

Keywords: *Implementation, Policy, Building permit*

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan pembangunan Kota Pekanbaru pada khususnya yang menunjukkan adanya kemajuan yang sangat pesat baik dibidang teknologi maupun dibidang pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat sangatlah berpengaruh kepada tatanan dan wajah kota mendatang, sehingga perlu adanya peningkatan kegiatan pemerintah untuk mengatur dan menata bangunan. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah mengesahkan PERDA Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru atas dasar pertimbangan:

- a. Bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota, sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ragam memerlukan penataan kota (perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang kota) secara terpadu, menyeluruh efisien dan efektif.
- b. Bahwa dalam rangka kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya Kota Pekanbaru yang indah, tertib, aman dan nyaman. Perlu memanfaatkan ruang kota secara optimal melalui proses perizinan bangunan yang tertib, sederhana

dan dilaksanakan waktu yang singkat.

- c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b diatas perlunya menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Tentang Izin Mendirikan Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru.

Upaya pengawasan yang dilakukan oleh camat dalam membina desa-desa yang berada dibawah pengawasannya khususnya Desa Pulau Busuk Jaya Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi, karena desa ini mengalami kemajuan dalam pembangunannya serta berhasil melaksanakan program-program desa dengan dana yang terbatas yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah.

Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang sedang berkembang di Kota Pekanbaru, letaknya Kecamatan Tampan yang strategis berada di jalan lintas Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatra Barat dan menjadi tujuan investasi yang selalu berkembang, oleh karena itu peneliti memilih Kecamatan Tampan untuk tempat penelitian, pembangunan ruko, perumahan dan tempat-tempat bisnis yang berdiri di Kecamatan Tampan banyak bermasalah dalam pengurusan izin, terkadang ada bangunan ruko, perumahan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Kecamatan Tampan memiliki luas 108,84 km², pada tahun 2001 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kecamatan Tampan 140.662, untuk kepadatan

1.292 jiwa/ km². Sedangkan data tahun 2010 warga Kecamatan Tampan sudah berjumlah 190 ribu. Jumlah sedemikian menunjukkan bahwa sebenarnya sebagian besar dari pertambahan penduduk yang terjadi bukan disebabkan pertambahan alami, melainkan karena migrasi.

Berikut merupakan fenomena yang terjadi dilapangan sementara camat kurang dalam yaitu:

- a. Diketahui bahwa sebagian masyarakat kurang mengetahui dengan jelas mengenai prosedur tentang cara untuk mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena kurangnya terealisasinya pemerintah kota pekanbaru memberikan keterangan tentang prosedur IMB.
- b. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki IMB
- c. Banyak bangunan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Perda No.14 Tahun 2000 tentang IMB.
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti penting IMB dalam penataan bangunan dalam mendirikan bangunannya
- e. Masih ditemukan penyelewengan-penyelewengan terhadap bangunan yang sudah didirikan
- f. Pengawasan dari dinas tata ruang dan bangunan sendiri hingga saat ini masih kurang.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; “Implementasi Perda Kota Pekanbaru Nomor 14 tahun 2000 tentang Izin Bangunan dalam Daerah

Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Tampan)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 mengenai Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru.
2. Apa faktor-faktor penghambat terlaksananya Perda Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Daerah Kota Pekanbaru

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Seiring dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 mengenai Izin Mendirikan Bangunan di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Daerah Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu, yakni Ilmu Administrasi Negara,

- terutama khususnya ilmu dibidang implementasi kebijakan
- b. Sebagai bahan masukan serta informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang permasalahan dan kajian yang sama dimasa yang akan datang.
 - c. Bagi pihak terkait seperti: Perangkat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan masyarakat setempat bermanfaat dan berguna sebagai bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam perencanaan pengelolaan secara holistik yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Konsep Teori

Sebagai upaya memahami, menganalisis permasalahan penelitian, diperlukan pendapat, pandangan para ahli (konsep/teori) sebagai pedoman yang dapat membantu dan memudahkan penelitian. Oleh karena itu diperlukan kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sisi mana permasalahan penelitian dibahas. Dalam penelitian ini pendekatan (kerangka) teori yang digunakan, diantaranya:

1. Kebijakan

Bridgman dan Davis dalam Suharto (2005:3) mengatakan bahwa kebijakan publik *“whatever government choose to do or not to do”*. artinya kebijakan publik adalah apa

saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Kebijakan publik itu sendiri menurut Nugroho (2009:8) adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua masalah yang menyangkut bersama dan sejumlah masyarakat di daerah.

William N. Dunn dalam Pasolong (2007 : 39) mendefinisikan kebijakan publik yaitu suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti keamanan, energi, kesehatan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Carl J Federick dalam Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Ndraha (2003:6) mendefinisikan arti pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang di perintah.

Kebijakan menurut Mustopadidjaja adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksana dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan (Nurcholis, 2005 ; 158).

Solichin Abdul Wahab (2008:7) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

2. Implementasi Kebijakan

Menurut Leo Agustino (2008:138) dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

Menurut Grindle (1980) dalam Wirawan (2012:45) mengatakan implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijaksanaan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan.

Menurut Azam Awang (2010:27), studi implementasi berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa program pemerintah tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting karena kebijakan akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Selanjutnya Riant Nugroho (2009:494) menjelaskan lagi kebijakan yang bisa langsung diimplementasikan,

tanpa memerlukan kebijakan turunannya, seperti: Kepres, Inpres, Kepmen, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dll, dan kebijakan yang membutuhkan kebijakan publik penjelas seperti Undang-undang dan PERDA.

Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2009:90) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi (sikap), (4) struktur birokrasi. dan keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif Dalam hal ini metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif diartikan dengan katakata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatarbelakangi. Deskriptif kualitatif juga diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, adapun alasan pemilihan lokasi adalah:

karena implementasi Perda belum terlaksananya Dinas Tata Ruang Kota Pekanbaru.

2. Informan Penelitian

Di dalam melakukan pemilihan key informan untuk mendukung hasil penelitian, maka pemilihan key informan dipilihkan orang yang benar-benar mengetahui dan menguasai serta teribat langsung dengan permasalahan. Informan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan, yaitu:

Tabel 1.1
Data Informan

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kadis Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru	1
2.	Kabag Perizinan Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru	1
3.	Kabag Informasi Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru	1
4.	Masyarakat Yang Mendirikan Bangunan Tidak ada IMB di Kecamatan Tampan	5
Jumlah		8

3. Jenis dan Sumber Data

Penulis menggunakan studi penelitian lapangan dan jenis data yang dipakai penulis sebagai pedoman adalah:

- Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh orang

yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan. Data primer juga disebut sebagai data asli.

- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data-data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai laporan penelitian, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi atau Pengamatan
Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis yang ada.
- b. Wawancara
Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth* interview) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau

informasi dari informan. Wawancara mendalam ini dilakukan terhadap nara sumber (*key informan*) yang dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena penelitian

- c. Dokumentasi

Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen resmi sebagai bukti-bukti fisik dari kegiatan yang telah diselenggarakan. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data-data/informasi, catatan, foto-foto kegiatan dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

5. Teknik Analisa Data

Analisis Data atau Pengolah Data adalah bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam juga membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Dimana dalam analisis ini, fokus penelitian maupun pembahasan kendati diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun pendiskrepsian fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkapkan secara rinci.

Analisa tabel tunggal dipergunakan untuk data yang diperoleh dengan metode survai, sedangkan untuk data kualitatif yang diperoleh dengan wawancara mendalam, FGD dan observasi dilakukan analisa dengan metode analisis

operational component berikut. Dalam pelaksanaan analisis data kualitatif bertujuan pada penggalian makna, penggambaran, penjelasan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing. Uraian data jenis ini berupa kalimat-kalimat, bukan angka-angka atau tabel-tabel. Untuk itu data yang diperoleh harus diorganisir dalam struktur yang mudah dipahami dan diuraikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan maka pada bab ini dapat diambil kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun kesimpulan dan saran dari penelitian ini sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik dikarenakan masih jarang petugas yang berwenang mengevaluasi dan menindak lanjuti kesalahan dan kekurangan petugas-petugas yang ada, sehingga membuat masyarakat belum merasakan pelayanan yang maksimal.
2. petugas-petugas Perizinan Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru belum begitu kuat

untuk menjalankan tugas tentang pengawasan peraturan pemerintah kota Pekanbaru dan masih separuh-separuh menjalankan tugas yang ada dilapangan sehingga masih banyak terdapat jenis pelanggaran dalam peraturan tersebut.

3. kurangnya kesadaran masyarakat akan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sehingga peraturan pemerintah kurang terimplemtasi secara baik

B. Saran

1. Disarankan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru agar turun kejalan untuk melihat dan mengevaluasi kinerja para anggota/petugas dari dinas tersebut, agar masyarakat merasa maksimal untuk menggunakan pelayanan yang maksimal.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk membantu pihak Dinas Perizinan Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan yang baik agar terciptanya keamanan dan kenyamanan
3. Disarankan kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru untuk memaksimalkan kinerja para anggota agar masyarakat mendapatkan keamanan dan kenyamanan sebagai rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Desa, Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kab. Lingga Prov. Kepulauan Riau. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*, PT. Buku Kita.
- Faisal Sanafiah, Metodologi Penehtian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 1999.
- Islamy, Irfan, M. 2000. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- N, Dunn, William. 2000, *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nucholis, Hanif. 2005, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Gaesindo.
- _____. 2006, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta, Garsindo.
- _____. 2004, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta, Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Sedarmayanti, 2004, *Good governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung, Mandar Maju.
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Solichin Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Santoso, Purwo, Hasrul Hanif, Rachmad Gustomi. 2004. *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*, Yogyakarta: FISIPOL UGM.
- Suharto, Edi. 2007, *Revisi Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- _____.2005, *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Rian Nugroho. D. 2009. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Wirawan. 2012, Evaluasi : Teori, Modal, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta, PT. Rajawali Perss.

<http://prestylarasati.wordpress.com/2007/12/10/mengurus-imb-ijin-mendirikan-bangunan/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru